

MAJALAH BANK INDONESIA
BICARA
RINGKAS DAN CERDAS

**FAKTOR PENTING
TRANSAKSI
VALUTA ASING**

**5 JURUS
MENUJU
INDONESIA
MAJU**

LOGO BARU KUPVA BB BERIZIN DENGAN QR CODE

AFTER



AUTHORIZED MONEY CHANGER
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
(KUPVA BB) Berizin

**KUPVA
BERIZIN**

公認両替店 الصراف
合法授权的外币兑换所 공식 환전소

PT SANTANA MONIKAYA
adalah KUPVA BB berizin dan diawasi oleh:

 **BANK INDONESIA**
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
No. ID 0001.001/0001

Contact center: 131
Whatsapp/Line: 0811-8-999-444

**SCAN DULU,
BARU TUKAR**

BEFORE



KUPVA BB Berizin Memiliki Logo Berisi :
Gambar & Tulisan KUPVA Berizin, Logo BI, Nomor ID
QR Code, *Contact Center Number*



PELAJARAN PENTING EKONOMI 2019

Tahun ini Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) memilih tema “Sinergi Transformasi Inovasi Menuju Indonesia Maju”, dan sudah selesai dilaksanakan pada 28 November 2019 lalu. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pun sudah menyampaikan evaluasi kinerja ekonomi 2019, prospek ekonomi, serta arah kebijakan BI ke depan.

BI selaku bank sentral akan terus melanjutkan kebijakan akomodatif yang telah diambil sepanjang tahun ini dengan tetap mencermati kondisi domestik dan

global. Utamanya dalam menghadapi penurunan globalisasi dan meningkatnya digitalisasi.

Dari PTBI yang dihadiri Presiden Joko Widodo, para pimpinan lembaga negara, menteri, kepala daerah, pimpinan perbankan dan korporasi non bank, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, sedikitnya ada tiga pelajaran penting dapat dipetik untuk memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia terus maju di tahun mendatang.

Pelajaran pertama, sinergi bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan yang diperkuat untuk ketahanan ekonomi nasional. Kedua, percepatan transformasi ekonomi agar pertumbuhan lebih tinggi melalui pengembangan sumber pertumbuhan dari dalam negeri dengan fokus pada industri manufaktur dan pengembangan pariwisata. Ketiga, inovasi ekonomi dan keuangan digital untuk memperkuat daya saing dan kepentingan nasional serta mempersempit kesenjangan masyarakat.

Pertemuan rutin yang diselenggarakan jelang akhir tahun ini, merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi BI. Pandangan mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, serta arah kebijakan menjadi topik utama yang ditunggu para pemangku kepentingan termasuk pebisnis.

DAFTAR ISI

03 | SALAM

04 | DAFTAR ISI

05 | EDITORIAL

06 | LENSA BICARA

Halau Money Laundry & Terorisme

10 | INFORMASI

Untuk Transaksi Lebih Cepat Dan Mudah

14 | SOROT

PTBI 2019: Komitmen Untuk Indonesia

22 | KOLOM

Optimistis Untuk Indonesia Maju

24 | TRENDING

Money Changer Kian Apik

30 | BICARA

Bisnis Kakap Penukaran Uang

32 | TIPS

Strategi Plesiran Anti Rugi

38 | JELAJAH

Sagu "Makanan Para DEWA"

42 | JASMERAH

Kolaborasi Pemerintah & Bank Indonesia

48 | KISAH PEJALAN

Serunya Jajan di Kota Kembang



54 | RESENSI

Kompleksitas Joker yang Manusiawi

56 | CELOTEH

Muhamad Filosopi, Chief Executive Officer dan Co Founder Legalku Digital

60 | PERISTIWA

Menuju Indonesia Maju



65 | BANG SEN

Money Changer KUPVA BB Berizin

66 | BISKUIT


Penanggung Jawab: Onny Widjanarko | Pemimpin Redaksi: Junanto Herdiawan | Redaksi Pelaksana : Jeffri D Putra, Cecep Ridwan, Mirza Afifa, IGABP Raditia, Afif Anggoro | Kontributor : Robby Fathir, Hendro Prasetyo Nugroho, Agus Seno Aji.


Konsultan: Grid Story Factory - Kompas Gramedia

Alamat Redaksi: Departemen Komunikasi Bank Indonesia
Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta

Telp. Contact Center: (021)131
e-mail: bicara@bi.go.id

 BankIndonesiaOfficial

 @bank_indonesia

 bank_indonesia

 Bank Indonesia Channel

REFLEKSI AKHIR TAHUN

Mendekati pergantian tahun, merefleksikan satu tahun yang sudah kita lewati selalu menjadi semacam kebutuhan. Dalam konteks manajemen modern, refleksi dimaknai evaluasi, yaitu suatu pekerjaan setelah perencanaan dan pelaksanaan. Sifatnya berupa penilaian, perbaikan, masukan terhadap kegiatan yang telah dilakukan, dan menganalisis kegiatan selanjutnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Maka kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang biasanya dilaksanakan setiap menjelang akhir tahun menjadi sarat maknanya, karena merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi BI kepada khalayak. Karena itu pada edisi BICARA kali ini kami mengangkat PTBI menjadi isu utama dalam kolom SOROT.



Selain itu, kekhawatiran merebaknya kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui lembaga keuangan, membuat BI merancang tiga strategi pencegahan. Hal ini menjadi isu menarik di tengah situasi terkini keamanan Tanah Air. Karena itu BI melibatkan peran serta masyarakat dan penyelenggara sistem keuangan. Pembahasan ini pun kami tampilkan pada rubrik TRENDING.

Oh ya, menjelang akhir tahun kami juga membuat ulasan khusus “koleksi” kuliner Bandung yang bisa menjadi panduan Sobat ketika berlibur nanti ke Kota Kembang di rubrik KISAH PEJALAN.

Selamat tahun baru 2020, semoga resolusi kamu dapat terealisasi!



TIME 16:37:31

CURRENCY BUY SELL

| | | | |
|-----|------|--------|--------|
| USA | USDA | 13,910 | 14,050 |
| USA | USDB | 13,860 | 14,050 |
| USA | USDC | 13,810 | 14,050 |
| USA | USDD | 12,000 | 14,050 |
| SGP | SGD | 10,330 | 10,440 |
| JPN | JPY | 127.50 | 129.50 |
| EUR | EURO | 15,530 | 15,730 |
| MYA | MYR | 3,370 | 3,470 |
| AUS | AUD | 9,620 | 9,770 |
| HKG | HKD | 1,785 | 1,825 |
| CHN | CHY | 1,995 | 2,040 |
| THA | THB | 460 | 480 |

DATE 13 Dec 2019

CURRENCY BUY SELL


| | | | |
|-----|-------|--------|--------|
| UAE | AED | 3,760 | 3,860 |
| IND | BND | 10,290 | 10,420 |
| CAN | CAD | 10,530 | 10,730 |
| SWI | CHF | 14,110 | 14,310 |
| GBR | GBP | 18,630 | 18,930 |
| TWN | NTD | 465 | 490 |
| HKG | HKD | 9,140 | 9,320 |
| HKG | HKP | 275 | 295 |
| HKG | HKR 1 | 3,690 | 3,790 |
| HKG | SAR 2 | 3,740 | 3,840 |
| KOR | KRW | 11.70 | 12.20 |
| VIE | VND | 0.58 | 0.68 |

DUA SISI
MONEY CHANGES

USDA = 100
USDB = 50 & 100
USDC = 5 - 20
USDD = 1

OPEN : 10.00 - 22.00

HALAU MONEY LAUNDRY & TERORISME

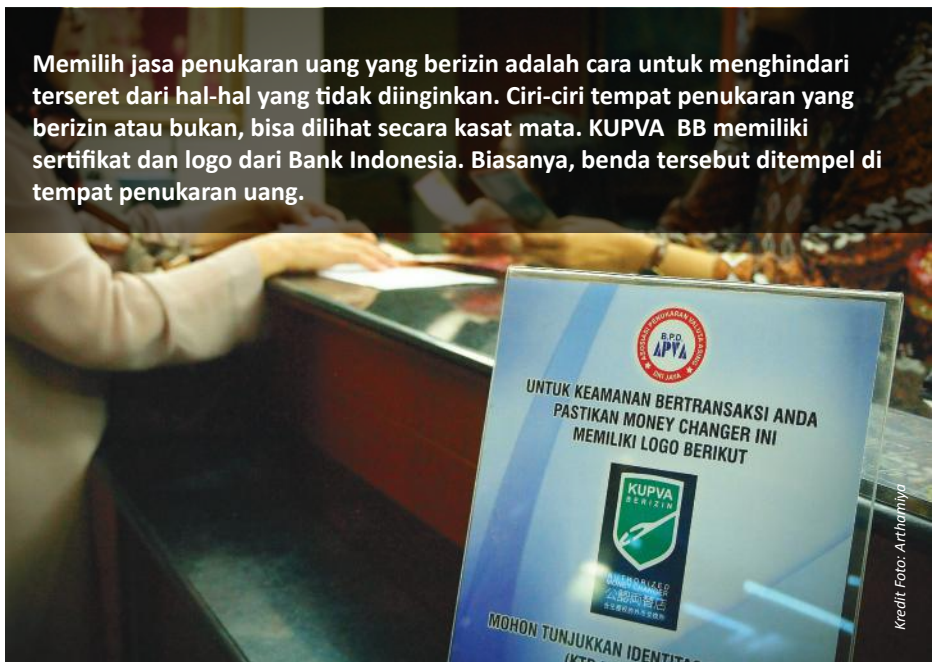
A photograph showing a man in a black and white striped shirt from behind, looking towards a woman wearing a red hijab. They are in a dimly lit room with a wooden ceiling and a glowing light fixture. The man's shirt has a QR code on the back, which is the subject of the article.

Pada 2017 tercatat ada 783 money changer atau Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang terindikasi bisa melakukan pencucian uang hingga memberikan pendanaan untuk kegiatan terorisme. Fakta ini merupakan hal yang mengkhawatirkan sehingga menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk dapat mengambil peran dalam APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Dan pada 2017 juga, Bank Indonesia melakukan penguatan mengenai APU PPT bekerja sama dengan POLRI dan Pemerintah dengan melakukan koordinasi untuk menertibkan *money changer* tidak berizin dan Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB) ilegal di wilayah Indonesia.

Salah satu program yang dirancang untuk mengatasi permasalahan ini adalah penerapan Quick Response (QR) Code pada logo KUPVA BB dan PTD BB. Program ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, lewat program ini, masyarakat juga diajak untuk lebih waspada dalam melakukan penukaran mata uang asing. Salah satu caranya adalah dengan mengecek stiker KUPVA BB dan memberikan data saat melakukan penukaran mata uang.

Kredit Foto: Arthamiya



Dengan KUPVA Berizin kita juga ikut dalam gerakan menghalau terorisme. BI meminta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjalankan prosedur APU PPT, melaporkan PJSP Selain Bank dan KUPVA BB tidak berizin kepada BI untuk mengurangi risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).



Kredit Foto: Arthamiya



Kredit Foto: Arthamiya

Masyarakat yang ingin menukarkan uang wajib memberikan identitas kepada PJSP Selain Bank dan KUPVA BB berizin saat bertransaksi. Petugas penukaran uang akan menanyakan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) untuk memastikan alamat si penukar uang agar tidak disalahgunakan.



UNTUK TRANSAKSI LEBIH CEPAT DAN MUDAH

*Penyempurnaan Sistem Kliring
Nasional Bank Indonesia*



Shutterstock/fizkes

Siang itu Erwin bingung bukan kepalang. Ia harus mentransfer sejumlah 110 juta rupiah untuk pembayaran dua buah sepeda motor yang dipesannya. Mau transfer via *internet banking* ada batas nominalnya, sementara kalau ke bank dengan RTGS (*real time gross settlement*) biaya transfernya terbilang besar.

Jika Erwin tahu tentang layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), maka ia sebenarnya tak perlu bingung. Karena layanan SKNBI membuat semua sistem pemindahan saldo menjadi lebih mudah, semakin cepat, memiliki limit transfer lebih besar, dan biayanya juga relatif murah. Karena

tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring.

Nah, Bank Indonesia (BI) pun terus berinovasi untuk meningkatkan layanan transaksi keuangan. Salah satu terobosan yang dilakukan bank sentral adalah menyempurnakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Peraturan yang berlaku mulai 2 September 2019 lalu itu membuat transaksi jadi lebih cepat dan mudah.

SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh BI dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik (DKE) pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.

Penyempurnaan ketentuan SKNBI dilakukan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan BI Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh BI. Selain itu, juga berdasarkan ketentuan teknis dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh BI.

Kebijakan penyempurnaan SKNBI ini merupakan *quick win* BI menuju *blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia



Shutterstock/Paisit Teeraphatsakool

2025. Lima visi sistem Sistem Pembayaran (SPI) 2025 bertujuan untuk memastikan arus digital berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif. “Itu semua harus dibarengi dengan sistem regulasi yang matang dan upaya mitigasi risiko. Dengan begitu, konsumen bisa merasakan manfaat dari layanan finansial,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Jika sebelumnya proses penyelesaian terjadi lima kali sehari untuk transfer dana, dan dua kali sehari untuk pembayaran reguler, dengan penyempurnaan SKNBI, per September kedua jenis transaksi tersebut akan terjadi sebanyak sembilan kali sehari. Penambahan frekuensi diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelesaian transaksi yang lebih cepat

bisa terpenuhi.

Selain penambahan frekuensi, beban biaya juga dipangkas bank sentral. Layanan transfer dana yang sebelumnya dikenai biaya Rp1.000 turun menjadi Rp600. Sementara biaya yang sebelumnya ditentukan maksimum Rp5.000 oleh bank bagi nasabah, turut dipangkas menjadi maksimum Rp3.500. Batas nilai transaksi pun ikut diperbesar, dari Rp500 juta menjadi Rp1 miliar. “Kami berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi keuangan yang makin hari makin cepat dan kian meningkat volumenya,” ujar Perry.

Sekadar gambaran, akhir 2018 lalu transfer dana SKNBI mencapai nilai Rp2.739,85 triliun, sementara frekuensi transaksinya mencapai 118,36 juta kali. Maka penyempurnaan SKNBI

ini diharapkan dapat meningkatkan frekuensi dan nilai transaksi nasabah.

“Masyarakat, baik individu maupun korporasi bisa punya lebih banyak pilihan, mau melalui SKN oleh Bank Indonesia meskipun masih ada jeda waktu, atau bisa menggunakan ATM, *mobile banking*, *internet banking* dari bank melalui perantara perusahaan *switching*,” kata Direktur Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran BI, Ery Setiawan.

Di sisi lain, penyempurnaan SKNBI diharapkan dapat mendukung program inklusi keuangan yang tengah digalakkan BI. Optimisme terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia juga disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky Purnomo. Ia bahkan menyebut, inklusi keuangan dapat mencapai 75 persen di akhir tahun bila semua elemen bersinergi memperkuat sistem ekonomi digital.

Menurut Pungky, tingkat inklusi tersebut meningkat 10 persen per tahun dari tahun 2014-2017. Dari realisasi itu, diperkirakan akses masyarakat terhadap layanan keuangan juga akan naik tiap tahun.

“Sampai 2019 sebesar 30 persen. Jadi dari 49 persen di 2017 ditambah 30 persen maka akan menjadi 79 persen, dan nanti akhir Desember 2019 akan sampai segitu,” ungkapnya.

"Terkait hal ini, Onny bilang beberapa bank sentral di negara macam Thailand, Singapura juga memiliki konsep serupa dan menjadi contoh BI.

Sebagai catatan, transfer dana yang biasanya dilakukan nasabah melalui infrastruktur perbankan semacam ATM atau *internet banking* sejatinya berbeda dengan SKNBI. Sebab transaksi tersebut terjadi secara langsung (*realtime*) dan diperantarai oleh perusahaan *switching*. Sementara infrastruktur SKNBI sepenuhnya dimiliki dan dikelola BI. Meskipun perbankan juga bisa memfasilitasi penyelenggaraan kliring.

Sementara dalam jangka panjang, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko menyatakan saat ini bank sentral juga tengah menggodok sistem kliring yang bisa diselesaikan secara *realtime* bertajuk BI Fast Payment. BI Fast Payment jadi salah satu fokus BI dalam mewujudkan visi pembayaran nasional 2025. Platform ini mirip seperti bentuk sistem pembayaran yang dimiliki perbankan dan diperantarai perusahaan *switching*. Ia bisa secara *realtime* melakukan transaksi, pun diproyeksi bisa berbiaya lebih murah dibandingkan transfer menggunakan

infrastruktur perbankan.

Terkait hal ini, Onny bilang beberapa bank sentral di negara macam Thailand, Singapura juga memiliki konsep serupa dan menjadi

contoh BI. “Di Thailand misalnya biayanya bisa sampai gratis, tapi nanti akan kami batasi limit transaksinya sehingga tak serta merta memakan bisnis perusahaan *switching* dan perbankan,” tutup Onny.







Menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi menjadi fenomena unik ekonomi global di tahun 2019. Secara umum, situasi kurang kondusif seperti perang dagang yang meluas dan kebijakan anti-globalisasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Sementara, peran digitalisasi ekonomi dan keuangan semakin meluas hingga ke berbagai sendi kehidupan masyarakat disertai manfaat dan risikonya. Untuk itu, ada 5 (lima) hal penting yang perlu mendapatkan perhatian terkait memperkuat ketahanan dan

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia menurun drastis pada 2019, dan kemungkinan belum pulih di tahun 2020. Perang dagang terbukti berdampak buruk bagi ekonomi di banyak negara, tidak hanya AS dan Tiongkok seperti yang sudah terjadi beberapa masa belakangan ini. Kedua, kebijakan moneter sendiri tidak selalu efektif. Upaya penurunan suku bunga dan injeksi likuiditas yang dilakukan banyak negara belum mampu menyelamatkan ekonomi dunia. Bank sentral tidak bisa terus mengandalkan



kebijakan moneter sebagai satu-satunya jalan dalam menstimulus ekonomi, dan membutuhkan sinergi bauran kebijakan ekonomi yang mencakup kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural.

Ketiga, fluktuasi arus modal asing dan nilai tukar terus berlanjut. Menariknya imbal hasil suku bunga harus terus dijaga. Namun demikian, kemudahan investasi dan promosi untuk menarik modal asing, merupakan satu hal yang lebih penting untuk terus difasilitasi. Keempat, digitalisasi yang meningkat pesat. Digitalisasi akibat perkembangan

zaman merasuk ke berbagai sektor, di antaranya sektor industri, sektor perdagangan ritel, kegiatan sistem pembayaran, dan sektor jasa keuangan.

Kelima, perilaku manusia. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya populasi milenial, teknologi digital juga mengubah perilaku manusia. Dengan berbagai kemudahan yang ada, tuntutan konsumen akan produk yang lebih murah, cepat dan sesuai selera juga harus diakomodasi oleh penyedia barang dan jasa.

Begitulah isi sambutan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam pembukaan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019, dengan tema “Sinergi, Transformasi, Inovasi: Menuju Indonesia Maju”. Tema ini menjadi penting dalam memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menghadapi memburuknya ekonomi global.

Kegiatan dimaksud dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, para pimpinan dan anggota DPR dan DPD-RI, pimpinan lembaga negara, menteri kabinet Indonesia Maju, Kepala Daerah, dan pimpinan perbankan, pada tanggal 28 November 2019 di Hotel Raffles, Jakarta.

Tema dimaksud bukan diangkat tanpa sebab, karena turut memerinci apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi. Singkatnya, Sinergi, transformasi, dan inovasi adalah tiga kata kunci untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan menuju Indonesia maju ke depan.

Sinergi. Sinergi ditekankan untuk menjelaskan bahwa bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dengan tujuan ketahanan ekonomi nasional. Hal tersebut tercermin dari inflasi yang dijaga tetap rendah, nilai tukar rupiah stabil, defisit transaksi berjalan terkendali, defisit fiskal aman, stabilitas sistem keuangan terjaga. Hal tersebut tentunya akan turut mendorong momentum pertumbuhan.

Transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi Indonesia dilakukan melalui sektor industri manufaktur, pariwisata, maritim, pertanian, UMKM agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai angka lebih tinggi lagi. Selain itu, upaya-upaya perbaikan iklim investasi melalui pembangunan infrastruktur dan SDM dipercepat. Dari sisi ekspor, transformasi ekonomi dilakukan melalui ekspansi perdagangan internasional secara bilateral, antar kawasan, maupun pasar-pasar baru.

Inovasi. Pengembangan Inovasi dititikberatkan pada inovasi digital, yang juga diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan sekaligus mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Pengembangan Inovasi digital di berbagai segmen antara lain: sistem pembayaran, jasa keuangan, ekonomi ritel, dan UMKM dilakukan melalui pengembangan *start-up* dan integrasi ekosistem untuk mencetak *unicorn* nasional.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Stabilitas Ekonomi Nasional dinilai



tetap Terjaga dengan Momentum Pertumbuhan yang terus berlanjut di tengah kondisi sejumlah negara resesi atau bahkan krisis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik di tahun 2019, dan akan diperkirakan meningkat pada 2020 yang ditopang oleh permintaan domestik, konsumsi, dan investasi.



Pertumbuhan yang membaik juga ditunjukkan oleh sejumlah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik juga tercermin atas pencapaian inflasi rendah sekitar 3,1 persen pada akhir 2019, dan diperkirakan akan tetap terkendali sesuai sasaran $3,0 \pm 1$ persen pada 2020. Rendahnya tingkat inflasi yang terjadi selama 5 tahun

terakhir ini tentunya akan mendukung daya beli masyarakat.

Rupiah juga terus menguat di tahun 2019, dan diprediksi akan terus bergerak stabil pada 2020. Di samping kebijakan BI, stabilitas rupiah juga didukung terjaganya keseimbangan neraca pembayaran dan cadangan devisa yang meningkat. Pertanda baik lainnya

adalah terjaganya sektor stabilitas sistem keuangan yang ditunjukkan oleh permodalan yang tinggi, *Non Performing Loan* (NPL) yang rendah, dan likuiditas yang cukup.

Kredit perbankan juga dinilai tumbuh terbatas pada 2019, dan diperkirakan meningkat pada 2020 sejalan turunnya suku bunga dan membaiknya prospek ekonomi kedepan. Selain itu, dalam jangka menengah prospek ekonomi Indonesia akan semakin baik.

Transformasi ekonomi akan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, tentunya dengan defisit transaksi

berjalan menurun dan inflasi rendah menuju Indonesia maju berpendapatan tinggi pada 2045.

Lalu apa saja action konkret pada tahun 2019 ini? Kebijakan makprudensial dilonggarkan untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan ekonomi, dalam hal ini mencakup keringanan rasio *Loan to Value / Financing to Value* (LTV/FTV) dan uang muka yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia sebagai respons dari penurunan BI7DRRR dalam beberapa bulan terakhir. Ketentuan rasio uang muka kredit diturunkan lagi untuk



mempermudah kepemilikan properti dan kendaraan, termasuk jenis yang ramah lingkungan.

Kebijakan untuk meningkatkan likuiditas juga dilakukan melalui Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Rasio ini menambah komponen seperti pinjaman/pembiayaan guna memperkuat pendanaan perbankan terutama bagi sektor UMKM dan

"Rupiah juga terus menguat di tahun 2019, dan diprediksi akan terus bergerak stabil pada 2020.

sektor prioritas, termasuk ekspor dan pariwisata.

Dalam PTBI 2019 dimaksud, komitmen

BI sebagai otoritas moneter akan terus menjaga sinergi dengan Pemerintah, mencermati perkembangan ekonomi domestik dan global ke depannya, serta

menggunakan ruang kebijakan moneter yang akomodatif, untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal, serta turut mendorong momentum pertumbuhan yang tercermin dari kebijakan penurunan suku bunga sebesar 100bps menjadi 5,0 persen dan Giro Wajib Minimum sebesar 100bps menjadi 5,5 persen.

Pencapaian rendahnya inflasi dan stabilnya Rupiah pada tahun 2019, tidak lepas dari bekerjanya seluruh instrumen bauran kebijakan BI yang diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan. Bauran kebijakan akomodatif seperti ini akan terus dilanjutkan pada tahun 2020 mendatang.

Di penghujung acara, Joko Widodo memaparkan tiga jurus jitu agar Indonesia tetap bertahan di tengah lesunya ekonomi global. Pertama, mampu bertahan di tengah kesulitan. Kedua, mampu mencari sumber ekonomi baru untuk tetap bertahan. Ketiga, optimis menghadapi berbagai tantangan.

Yuk, bersama kita wujudkan Indonesia maju!



Junanto Herdiawan,
Direktur Departemen Komunikasi
Bank Indonesia



OPTIMISTIS UNTUK INDONESIA MAJU

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) adalah sebuah forum tahunan yang penting bagi bank sentral Tanah Air, karena di situ adalah tempat penyampaian prospek ekonomi yang dilakukan Gubernur Bank Indonesia (GBI) kepada pemangku kebijakan terkait *state of the economy* tahun berjalan.

PTBI yang dilakukan secara rutin setiap tahun sejak 1969 ini, adalah hal yang baik karena pidato GBI akan menjadi *guidance* untuk *market* dan pelaku pasar ke depannya. Karena itu dalam setiap PTBI juga diberikan penghargaan untuk

pihak-pihak yang mendukung kebijakan BI atau ekonomi Indonesia. Tahun ini BI memberikan kepada 39 pelaku ekonomi dari 13 kategori yang terdiri dari korporasi, individu, perbankan, dan klaster.

Tema PTBI 2019 adalah “Sinergi, Transformasi, dan Inovasi: Menuju Indonesia Maju” yang dipilih karena sangat relevan dengan zaman. Saat ini kita membutuhkan 3 hal itu. Sinergi dengan pemangku kebijakan, pembuat keputusan, pelaku usaha, dan masyarakat karena penyelesaian masalah

bangsa ini tidak bisa dilakukan sendiri.

Hal ini sejalan dengan pesan Presiden RI, Joko Widodo, yang menginginkan inovasi bisnis untuk menciptakan hal baru, dan tentunya masuk ke dalam ranah digital sesuai perkembangan zaman. Karena itu diperlukan transformasi yang komprehensif untuk menuju Indonesia maju.

Bagi milenial dan anak muda, PTBI secara tersirat membawa pesan penting untuk tetap menjaga optimisme, kepercayaan, dan harapan kepada masa depan. Jadi, sebagai generasi penerus bangsa kita harus jeli dalam melihat potensi ekonomi Indonesia. Sudah semestinya kita tetap *building confidence* dan optimistis terhadap masa depan bangsa untuk kemajuan bersama.

Faktanya, dalam kondisi perekonomian global yang belum kondusif, bauran kebijakan BI yang telah ditempuh pada tahun 2019 akan semakin diperkuat pada 2020 melalui enam fokus area

kebijakan. Pertama, kebijakan moneter tetap akomodatif. Kedua, kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong pembiayaan ekonomi. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran dalam penguatan instrumen dan infrastruktur publik berbasis digital. Keempat, penguatan kebijakan pendalaman pasar uang. Kelima, mendorong kebijakan pemberdayaan ekonomi syariah dan UMKM. Keenam, memperkuat sinergitas kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan, sinergi transformasi ekonomi, dan sinergi dalam inovasi digital.

Lebih jauh, penyelenggaraan PTBI ini diharapkan dapat menginisiasi gerak langkah bersama yang harmonis dalam menjaga stabilitas dan kemajuan perekonomian Indonesia.

Yuk, bersama-sama kita terus optimistis untuk mewujudkan Indonesia maju!

 @junantohardiawan



MONEY CHANGER KIAN APIK

Strategi Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

“*Money changer* itu banyak digunakan untuk pencucian uang, narkoba, perjudian dan lain-lain. Untuk itu kita sepakat bekerja sama untuk meningkatkan penertiban terhadap *money changer* tidak berizin.” Begitulah ujar pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Jenderal Polisi Idham Azis, saat dimintai pendapatnya mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) oleh sebuah media.

Bagaimana tidak, jika kita mundur sedikit ke tahun 2017 tercatat ada 783 *money changer* atau Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang terindikasi bisa melakukan pencucian uang hingga memberikan pendanaan untuk kegiatan terorisme. Sehingga menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk dapat mengambil peran dalam APU PPT.

Sebagai langkah awal APU PPT di bidang sistem pembayaran,





Shutterstock/DedMityay

pada tahun 2017 Bank Indonesia melakukan penguatan mengenai APU PPT bekerja sama dengan POLRI dan Pemerintah. Kerja sama tersebut dilakukan dalam konteks koordinasi, untuk menertibkan *money changer* tidak berizin dan Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB) ilegal di wilayah Indonesia. Penertiban terhadap penyelenggara tidak berizin dan penerapan *Quick Response (QR) Code* pada logo KUPVA BB dan PTD BB merupakan salah satu bentuk

perlindungan kepada masyarakat dari kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Langkah nyata berikutnya yang dilakukan BI terkait APU PPT adalah bekerja sama dengan beberapa *stakeholders* terkait yang tergabung dalam Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nasional dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara anggota *Financial Action Task Force (FATF)* pada tahun 2020.



Untuk menjadi *full member* FATF, Indonesia harus melalui proses *Mutual Evaluation* (ME) FATF untuk menilai tingkat kepatuhan (*technical compliance*) terhadap 40 rekomendasi FATF serta efektivitas penerapan (*immediate outcome*) sistem APU PPT dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan dari TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Dengan bergabung menjadi anggota FATF, Indonesia akan mendapatkan

banyak manfaat, antara lain:

1. Percepatan untuk menjadi negara yang diakui memiliki integritas sistem keuangan yang tinggi dengan menerapkan standar-standar internasional untuk mencegah kejahatan dalam sektor keuangan;
2. Menjadi pijakan kuat ke depan bagi perkembangan ekonomi Indonesia di dunia, di mana hal ini dapat meningkatkan peringkat Indonesia di berbagai aspek, termasuk investasi;
3. Sarana untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia sebagai negara besar khususnya di Asia dan *emerging market* yang tentunya dapat berdampak positif bagi perkembangan ekonomi domestik;
4. Dapat berperan aktif dan terdepan dalam penetapan standar internasional APU dan PPT yang bermanfaat bagi pengembangan kerangka APU dan PPT domestik serta penyusunan respons kebijakan ke depan untuk *emerging market*;
5. Efektivitas perumusan *stance* Indonesia dalam pembahasan di forum dan rapat internasional.

Nah, tentunya keuntungan-keuntungan tersebut akan meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam memerangi pencucian uang dan tindakan pendanaan terorisme yang berdampak kepada banyak aspek.

Dalam melaksanakan wewenangnya terkait APU PPT di bidang sistem pembayaran, BI menerapkan 3 (tiga) strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan standar atau prinsip APU PPT, baik secara nasional maupun internasional;
2. Peningkatan *awareness* publik



Shutterstock/Andrey_Popov

dan penyelenggara terkait risiko TPPU dan TPPT;

3. Peningkatan koordinasi/kerja sama antar lembaga, secara nasional & internasional.

Dari sisi pengaturan, BI telah menerbitkan ketentuan mengenai penerapan program APU PPT bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA BB yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/10/PBI/2017.

Pengawasan di bidang Sistem Pembayaran juga turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan APU PPT, baik diterapkan oleh penyelenggara maupun oleh BI sendiri. Hal ini juga tertuang dalam PBI mengenai APU PPT yang mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach - RBA*) dalam implementasi APU PPT.

Tidak hanya dengan POLRI, BI senantiasa melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan instansi/ otoritas terkait lainnya. Dalam skala Internasional, BI secara aktif menjalin kerja sama dengan Bank Negara Malaysia, Banko Sentral ng Pilipinas, Bank of Thailand, serta lembaga internasional lainnya. Kerja sama tersebut merupakan bukti partisipasi aktif BI mendukung Pemerintah dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, utamanya

sebagai otoritas sistem pembayaran.

Penerapan prinsip APU PPT yang efektif diyakini dapat mendukung integritas sistem keuangan di Indonesia, meningkatkan kredibilitas dan reputasi Indonesia, serta memenuhi kepatuhan terhadap standar internasional APU PPT yang berlaku.

Informasi Kepada Masyarakat

Dalam hal pemberian informasi yang utuh kepada pelaku PJSP selain bank dan *money changer* serta memberikan *awareness* masyarakat terhadap APU PPT, segala informasi tersebut diberikan BI baik melalui *website* BI maupun kegiatan edukasi aktif kepada masyarakat untuk



menggunakan PJSP Selain Bank dan KUPVA BB berizin. Hal ini dilakukan di level Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BI untuk meminimalkan celah-celah yang mungkin ditimbulkan oleh para pelaku kejahatan.

"Bank Indonesia sangat mendukung upaya pemerintah mencegah kejahatan lintas negara berupa tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.

PJSP Selain Bank dan KUPVA BB harus konsisten menerapkan APU PPT antara lain wajib melakukan identifikasi dan verifikasi setiap transaksi, wajib menolak transaksi yang tidak dilengkapi dengan identitas pengguna jasa, serta wajib melaporkan seluruh transaksi

mencurigikan kepada PPAK.

Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam menjalankan prosedur APU PPT dalam menggunakan PJSP Selain Bank dan KUPVA BB berizin. Caranya, melaporkan PJSP Selain Bank dan

KUPVA BB tidak berizin kepada BI, dan wajib memberikan identitas kepada PJSP Selain Bank dan KUPVA BB berizin saat bertransaksi.

Jadi teliti dulu sebelum bertransaksi ya, *guys!*



Shutterstock/Om Yos

**Prita Tunjung Sari ,
PT Ariesanta Permana Sari**

BISNIS KAKAP PENUKARAN UANG

Membangun sebuah *money changer* atau Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) bisa dikategorikan sebagai bisnis serius, karena modal yang dibutuhkan cukup besar. Sehingga banyak *money changer* dimiliki secara patungan (saham).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/15/DPM tanggal 10 Mei 2012, KUPVA BB diwajibkan memiliki jumlah modal awal minimal Rp250 juta dan mengajukan izin ke BI selaku regulator. Setelah permohonan dikabulkan dan semua syarat dipenuhi, sebuah KUPVA BB berhak mencantumkan tulisan “Pedagang Valuta Asing Berizin” atau “*Authorized Money Changer*” pada papan namanya.

Lantas bagaimana seluk beluk bisnis ini untuk mendapatkan keuntungan? Berikut ini adalah wawancara dengan Prita Tunjung Sari dari PT Ariesanta Permana Sari.

Bagaimana awal mula Anda menekuni bisnis money changer?

Saya lahir dan besar di Bali, seperti yang kita semua tahu, industri yang paling berkembang di Bali adalah industri pariwisata. Melihat potensi pariwisata Bali yang terus berkembang inilah yang menjadi semangat bagi saya untuk memulai bisnis penukaran uang asing.

Tantangan apa yang Anda hadapi selama menjalani bisnis ini?



Menurut saya, kompetisi menjadi tantangan utama dalam menjalankan bisnis ini. Jika diperhatikan, masih banyak *money changer* liar yang tidak memiliki izin beroperasi di lapangan. *Money changer* liar ini juga berpotensi merusak pasar dengan memberikan layanan yang tidak aman dan dengan harga yang seenaknya. Dengan bantuan Bank Indonesia (BI) untuk menyisir dan menindak *money changer* ilegal, tentunya akan membuat bisnis penukaran mata uang asing semakin kondusif.

Perkembangan teknologi juga menjadi perhatian kami saat ini. Teknologi yang memudahkan para wisatawan untuk menjadi *less cash society*. Tidak sedikit wisatawan yang datang dan bertransaksi hanya dengan menggunakan *smartphone*-nya. Tentunya tantangan seperti ini harus kita antisipasi dengan lebih mengembangkan jasa yang mampu mengakomodasi kebutuhan pasar saat ini.

Seberapa besar peluang dan persaingan di bisnis money changer?

Di Bali sendiri peluang bisnis penukaran valuta asing masih sangat berkembang. Tercatat Januari hingga September 2019, tidak kurang dari 12 juta wisatawan mancanegara mengunjungi Indonesia. Untuk Bali sendiri terdapat 4 juta wisman yang merepresentasikan 30 persen dari data tersebut.

Persaingan antar bisnis penukaran valuta asing saya rasa cukup kondusif. Hal ini didukung dengan keberadaan dari Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) baik di level pusat maupun daerah dalam menjaga kondisi pasar tetap baik.

Berdasarkan pengalaman Anda, kapan “musim panen” bagi pengusaha money changer?

Musim liburan pertengahan tahun dan akhir tahun masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi omzet retail kami. Sedangkan untuk B2B biasanya memperhatikan kondisi keuangan global, bisnis ekspor impor yang tentunya harus memperhatikan harga atau *rate* mata uang yang mereka gunakan dalam bertransaksi.

Strategi marketing seperti apa yang Anda lakukan untuk memikat pelanggan?

Sebagai sebuah perusahaan jasa, tentunya *service* harus menjadi fokus utama kami. Kami memastikan para konsumen dapat menjalankan transaksi dengan aman, mudah, dan nyaman. Untuk pelanggan yang berbentuk perusahaan tentunya kami menawarkan dengan harga yang kompetitif.

Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global?

Sebagai bentuk *compliance* kepada BI, kami menghindari untuk melakukan transaksi derivatif dan transaksi yang tidak dianjurkan lainnya. Hal ini tentunya sebagai bentuk antisipasi terhadap sensitivitas mata uang asing terhadap perkembangan ekonomi global. Kami memberikan kepercayaan kepada BI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha penukaran mata uang asing, tentunya juga di dalam situasi dan kondisi ekonomi yang tidak terduga seperti sekarang ini.

MENUKAR UANG ASING

STRATEGI PELESIRAN ANTI RUGI



Akhir tahun merupakan waktu favorit bagi banyak orang untuk liburan. Sejumlah orang memilih untuk rehat sejenak dari padatnya kesibukan dengan berwisata ke negara lain. Apa lagi saat ini banyak paket wisata yang menawarkan jasa perjalanan ke mancanegara dengan harga yang relatif terjangkau.

Nah, selain riset mengenai tempat wisata yang wajib dikunjungi, Sobat juga wajib mencicipi makanan serta membawa *outfit* yang sesuai untuk di-*upload* ke Instagram *feed*. Selain itu siapkan pula paspor dan visa yang masih berlaku, dan yang tak kalah penting jangan sampai lupa menukarkan dana dengan mata uang negara tujuan!

Yang disebut terakhir kesannya memang sepele, namun nyatanya ada hal yang harus diperhatikan dalam menukar mata uang asing, seperti yang disarikan berikut ini;

Pertama, perhitungkan dengan cermat berapa uang tunai yang harus Sobat bawa supaya dapat berlibur di luar negeri dengan aman dan nyaman. Patut diketahui bahwa setiap negara melakukan pengawasan terhadap aliran uang yang masuk dan keluar. Sebab, uang dianggap memiliki risiko atau berhubungan erat dengan kegiatan kriminal. Beberapa negara seperti Inggris dan Uni Eropa bahkan memiliki batasan jumlah uang tunai yang boleh dibawa masuk.

Tahun 2018 silam, pengacara nyentrik Hotman Paris Hutapea pernah terciduk pihak berwenang Italia karena

Shutterstock/Omjai Chalard

membawa uang 20 ribu euro atau sekitar Rp300 juta. Melansir dari situs resmi

europa.eu, batas uang tunai yang boleh dibawa masuk dan keluar sebesar 10 ribu euro. Jika membawa uang lebih banyak dari itu, maka harus melapor kepada pihak bea cukai setempat.

Aturan ini diberlakukan untuk mencegah adanya aktivitas kriminal seperti tindak pencucian uang, ataupun pembiayaan terhadap terorisme.

Meski ada batas maksimal terkait jumlah uang tunai, bukan berarti Sobat harus membawa uang pas-pasan. Hitung secara rinci kebutuhan selama perjalanan sehingga mudah menentukan jumlah uang yang akan ditukarkan. Pastikan jumlah ini mencukupi untuk semua kebutuhan selama di luar negeri, seperti makan, transportasi, akomodasi, belanja, dan kebutuhan darurat.

“Untuk hotel dan tiket wahana yang akan dikunjungi biasanya saya sudah membeli terlebih dahulu di Indonesia, karena praktis dan biasanya lebih murah,” ujar Margaretha, salah seorang penyuka jalan-jalan asal Pontianak, Kalimantan Barat.

Kedua, pilih tempat penukaran yang tepat. Margaretha yang akrab disapa Etha, sudah memiliki *money changer* langganan. Meski demikian, ia kerap membandingkan harga tukar di *money changer* langganannya dengan tempat lain. Setali tiga uang dengan Etha, Inka Tiono, *influencer* yang berdomisili di Jakarta Utara ini biasanya mengecek nilai tukar mata uang asing lewat internet. Ia lalu menghubungi ke beberapa *money changer* langganan, sebelum akhirnya



melakukan penukaran.

Baik Etha maupun Inka tidak menyarankan untuk menukarkan uang di bandara, sebab di tempat tersebut nilai tukar uang umumnya kurang menguntungkan. Keduanya juga tidak menyarankan untuk menukarkan uang di negara tujuan (apalagi bila mata uangnya lebih kuat dari Rupiah) karena kemungkinan akan merugi karena besarnya selisih.

Sebaliknya apabila ingin menukarkan kembali mata uang asing ke Rupiah, Inka menyarankan agar dilakukan saat masih di luar negeri, mengingat beberapa



Kredit Foto: Arthamiya

negara justru bisa memberikan nilai tukar yang lebih tinggi dan menguntungkan. “Namun bila memiliki rencana atau sering bepergian ke luar negeri, simpan saja uang tersebut,” saran Inka.

Ketiga, tukarkan uang di saat yang tepat. Menukarkan uang di awal pekan bisa dijadikan sebagai pertimbangan, mengingat di saat tersebut kurs cenderung stabil apalagi di pagi hari. Di musim liburan kemungkinan nilai kurs akan meningkat, maka sebaiknya Sobat menukarkan uang beberapa minggu sebelumnya.

Terakhir, pelancong dapat berstrategi dengan menukarkan Rupiah ke USD terlebih dahulu, baru kemudian dikonversi ke mata uang negara tujuan. Beberapa mata uang asing memiliki selisih nilai tukar yang cukup tinggi terhadap Rupiah, misalnya saja Euro atau bahkan Baht. Dengan menukarkan Rupiah ke USD terlebih dulu, baru kemudian ditukarkan menjadi Euro, kemungkinan Sobat akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selamat berlibur!

KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (KOMITE TPPU)

PREDIKAT KEJAHATAN ▾

HASIL KEJAHATAN ▾

DPR

KELOMPOK
PELAPORAN

BANK & NON BANK

PENYEDIA BARANG
DAN JASA

BISNIS NON FINANSIAL
DAN PROFESI YANG DITUNJUK
(DNFBPs)

KEMENHAN

BADAN SUPERVISI DAN
REGULASI



BANK INDONESIA

OJK
(Otoritas Jasa Keuangan)

BAPPEBTI

PENDEKATAN APU PPT

UPAYA

1. NASIONAL

PERIZINAN KEGIATAN
USAHA PENUKARAN
VALUTA ASING (KUPVA)



QR CODE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



2. INTERNASIONAL

KERJASAMA DENGAN BANK SENTRAL NEGARA SAHABAT


- Banko Sentral ng Pilipinas (4 Agustus 2018) 
- Bank of Thailand (4 April 2019) 
- Bank Negara Malaysia (27 September 2019) 

SAGU

"MAKANAN PARA

DEWA"





Sebagai sumber pati, sago mempunyai peran penting sebagai bahan pangan pokok pengganti nasi. Sago bisa dibilang adalah sumber makanan masa depan dengan biaya produksi yang relatif lebih rendah dan murah dibanding beras.

Dengan kandungan karbohidrat yang cukup untuk kebutuhan manusia, sago nyatanya juga memiliki sumber energi meski tidak membawa kadar gula yang akan merugikan tubuh. Selain itu terdapat kandungan glukosamina dan potasium yang baik untuk menjaga kesehatan tulang, organ, serta kestabilan kadar gula darah. Tak heran jika sago disebut juga “makanan para dewa”.

Kelebihan ini sejalan dengan kebutuhan banyak orang yang semakin *concern* untuk hidup sehat. Karena itu beberapa kelompok pembudidayaan sago saat ini semakin terintegrasi dalam tiga hal; peningkatan jumlah produksi, membuat produk turunan, serta menjalankan sistem pemasaran komprehensif.

Nah, salah satu sentra produksi sago ada di Desa Sungai Tohor. Desa ini terletak cukup terpencil meski satu pulau dengan ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.



Wilayahnya
dikelilingi
hutan rawa

gambut. Karenanya akses keluar masuk hanya melalui jalur laut perairan di Selat Malaka.

Faktanya desa ini dikenal luas sebagai penghasil sago terbesar di Sumatera, bahkan Indonesia. Hampir 50 persen produksi sago nasional dihasilkan di sini. Sarganya pun jenis terbaik. Sagu organik yang diolah langsung dari proses teras batang rumbia atau pohon sago tanpa campuran bahan kimia lainnya.

“Industri sago masyarakat sudah ada sejak saya kecil. Sagu diolah secara tradisional di rumah-rumah. Lalu pada tahun 1970-an saya mulai membangun kilang sago yang pertama. Sekarang di Sungai Tohor sudah ada 14 kilang pengolahan sago, sehingga butuh pengairan yang baik,” kata Pak Nong, masyarakat setempat yang masih bugar di usianya yang ke 73 tahun.

Sejak kilang-kilang sago masyarakat bermunculan, nama Sungai Tohor mulai terdengar. Apalagi kapasitas produksinya besar. Satu kilang sago bisa memproduksi sago mentah hingga 50 ton dalam 1 bulan. Sementara kebutuhan sago dalam negeri dan ekspor kadang bisa lebih dari 600 ton dalam sebulan.

Dengan harga pasaran sago mentah Rp1.800 per kilogram, produksi sago yang lancar setiap bulannya akan menjamin perekonomian yang lebih baik bagi masyarakat Sungai Tohor. Karena itulah Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengajak banyak pihak untuk mendukung industri sago masyarakat Sungai Tohor.

Inisiatif pengembangan komoditas sago ini juga datang dari Bank Indonesia (BI). Bantuan pengembangan yang diberikan BI bukan sekadar untuk produksi saja, namun sekaligus mengubah *mindset* masyarakat setempat untuk mencapai taraf hidup

yang lebih baik. BI menawarkan konsep sagu yang bisa dimanfaatkan lebih banyak dari biasanya. Selain memberi bantuan kilang pengolahan sagu, BI mengajak ibu-ibu membuat produk turunan seperti gula sagu.

Implementasi konsep di atas adalah fokus Program Sosial Bank Indonesia atau PSBI, untuk menghadirkan Program Pemberdayaan Perempuan. Dengan program ini ibu-ibu di Sungai Tohor diajak berpartisipasi dalam industri sagu masyarakat dengan membuat produk komersial gula sagu cair dan padat. Program ini pun sejalan dengan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dari pemerintah daerah yang dihadirkan untuk ibu-ibu di Sungai Tohor.

“Harapan kami kegiatan ini bisa menciptakan lapangan kerja bagi ibu-ibu agar bisa membantu suami meningkatkan perekonomian

keluarga,” bilang ibu Alida Susanti dan Ibu Susilawati, perwakilan pengurus UP2K Sungai Tohor.

Dalam proses pemasaran, produksi sagu dan produk olahan sagu dari Sungai Tohor menjadi pengisi tetap sentra industri kecil dan menengah di kawasan Tebing Tinggi. Sentra industri tersebut mendorong produk pilihan seperti sagu Sungai Tohor menjadi lebih layak jual, salah satunya dengan memberi kemasan yang rapi dan menarik agar dilirik konsumen.

Nah, untuk Sobat yang aktif, mungkin saat ini bisa menjadikan sagu dan produk turunannya sebagai bahan pangan alternatif penghasil energi tanpa menimbulkan rasa kenyang dan menyehatkan. Faktanya, ibarat raksasa yang tertidur, potensi sagu yang sangat besar bisa sangat menguntungkan bila dikelola dengan baik.





SEJARAH UANG KERTAS DAN LOGAM INDONESIA

KOLABORASI PEMERINTAH & BANK INDONESIA

Pernahkah Sobat punya pengalaman bertransaksi secara barter? Sebetulnya cara itu masih dilakukan sampai sekarang. Misalnya saat seorang teman hendak melepas salah satu koleksi sepeda Brompton-nya, tapi ia tak ingin menjualnya di *marketplace*,

melainkan menukar dengan sepeda lipat Bike Friday yang dimiliki teman lain. Setelah dicapai kesepakatan, kedua sepeda lipat itu pun berpindah tangan di antara kedua teman.

Proses barter barang yang terjadi di



masa lampau kemudian berubah saat ditemukan uang sebagai alat pembayaran. Pada awalnya, uang memiliki nilai intrinsik karena dibuat dari material bernilai tinggi dengan proses pembuatan yang rumit di zamannya. Hal ini juga terjadi di bumi Nusantara pada zaman kerajaan.

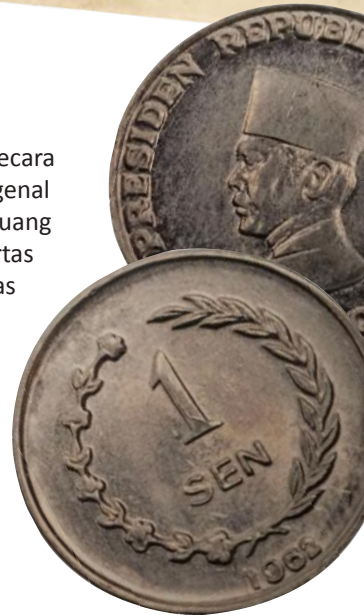
Antara abad ke-4 hingga ke-14, dikenal mata uang berbahan logam sebagai nilai tukar. Material dasarnya adalah emas, perak, tembaga, timah, atau perunggu. Kemudian terjadi perkembangan pada masa penjajahan Belanda, selain mata uang logam yang sudah dulu dikenal, mulai diproduksi dan dipakai pula mata

uang dari kertas.

Sampai hari ini secara umum kita mengenal dua bentuk fisik uang Rupiah, yaitu kertas dan logam. Lantas bagaimanakah perjalanan sejarah dua material uang tersebut selepas kemerdekaan?

Uang Kertas

Uang dari bahan kertas pertama kali diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) adalah pecahan Rp0,5 ORI seri 1 yang ditandatangani Menteri





Rp 1000
Uang Bank Indonesia Seri Hewan Tanpa Tanda Tahun
Bagian Depan, Seekor Gajah
Bagian Belakang, Nelayan DI Pantai

Kuangan, A.A Maramis. Dicitak oleh Pertjetakan Negara RI dan diterbitkan pada 17 Oktober 1945. Uang dengan nilai Rp0,5 menjadi salah satu koleksi numismatika Museum Bank Indonesia. Desain depan bergambar ornamen

kepala banteng. Desain belakang teks undang-undang dan terdapat gambar ornamen.

Pemerintah RI juga melansir uang kertas pecahan Rp1 dan Rp2,5. Uang kertas ini

adalah uang kertas Seri Pemandangan Alam bertanda tahun 1951 dan 1953, serta Seri Suku Bangsa bertanda tahun 1954 dan 1956. Berdasarkan Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, BI diberikan wewenang untuk mengedarkan uang, namun hanya uang kertas dengan pecahan Rp5 ke atas.

Uang kertas pertama yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) adalah uang kertas bertanda tahun 1952. Uang kertas ini dikeluarkan dalam tujuh pecahan, mulai dari Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp100, Rp500, dan Rp1.000. Desain yang ditampilkan bernuansa budaya Indonesia sehingga ada yang menyebutkannya sebagai uang Seri Kebudayaan. Uang kertas tersebut baru diedarkan setelah berlakunya UU No. 11/1953 pada tanggal 1 Juli 1953 bersamaan dengan pendirian BI.

Pencetakan mayoritas uang-uang tersebut masih dilakukan di luar negeri, yaitu oleh percetakan Thomas De La Rue & Co di Inggris untuk pecahan Rp5, sedangkan pecahan-pecahan lain oleh percetakan Johan Enschede en Zonen, Imp di Belanda. Namun ada juga yang dicetak oleh NV Percetakan Kebayoran, yaitu sebagian dari pecahan Rp10 dan Rp25.

Uang Logam

Berdasarkan Undang-undang Mata Uang 1951, Pemerintah mengeluarkan

beberapa macam atau emisi uang logam. Uang logam Pemerintah Indonesia dari bahan aluminium meliputi pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, dan 25 sen. Semua pecahan itu berbentuk lingkaran dengan lubang di tengah khusus untuk pecahan 1 sen dan 5 sen.

Desain pada pecahan 1 sen sama dengan pecahan 5 sen, yaitu gambar seuntai padi bertuliskan "INDONESIA". Di bagian depan terdapat nilai nominal dan tahun pencetakan, sedangkan di bagian belakang terdapat tulisan Arab Melayu yang berbunyi Indonesia mengelilingi lubang.

Bagian depan pecahan 10 sen dan 25 sen menampilkan empat ornamen berbentuk bunga, dengan





tulisan “Indonesia” serta terdapat nilai nominal dan tahun pencetakan. Sedangkan di bagian belakang uang terdapat gambar Garuda Pancasila serta tulisan Arab Melayu yang berbunyi Indonesia di atasnya.

Selain uang logam aluminium, Pemerintah juga melansir uang tanpa seri untuk peringatan

25 tahun Indonesia merdeka dari bahan emas. Pertama, uang Rp2.000 (peringatan 25 tahun Kemerdekaan RI). Uang ini memiliki berat 4,93 gram. Desain depannya bergambar burung Cendrawasih, dengan lambang negara dicetak di bagian belakang. Uang seri khusus ini diproduksi





oleh Ital Cambio Italia dan diterbitkan pada 17 Agustus 1970.


Selain Pemerintah, Bank Indonesia juga mengeluarkan uang logam dalam pecahan Rp1, Rp2, dan Rp5 berbahan aluminium pada tahun 1970. Desain depan terdapat tulisan BANK

INDONESIA, nilai rupiahnya, serta tanda tahun. Pada desain belakangnya terdapat gambar burung Sikatan (Rp1), padi dan kapas (Rp Rp2) dan juga gambar burung Srigunting (Rp5). Semua uang tersebut dicetak oleh PN Arthayasa.





SERUNYA JAJAN DI
KOTA
KEMBANG



Tak lengkap rasanya jika ke Bandung tanpa berburu kuliner jalanan yang lezat dan ramah kantong.

Apa yang tersirat ketika mendengar kata Bandung? Kota wisata yang sejuk? Kota kreatif? Atau makanan enak? Nah, buat banyak orang, Bandung memang dikenal sebagai salah satu kota tujuan wisata kuliner. Sobat tak akan kesulitan mencari makanan dan panganan enak di Bandung.

Mulai dari pagi hari hingga ke pagi lagi, petualangan kuliner kita bisa terpenuhi dengan mudah. Setiap sudut kota pasti menawarkan beragam pilihan menu yang menggugah selera. Yang asyik, panganan dari kota ini bisa dijadikan buah tangan. Pembahasan wisata kuliner di Kota Kembang kami mulai dari depan kantor Bank Indonesia Bandung.



JAJANAN ENAK & MURAH

Pasar Gede yang berusia satu abad ini adalah tempat yang tepat untuk mencari kuliner murah dan lezat.

Shutterstock/Fahmi Anugrah

Pilihan seru untuk berwisata kuliner di Bandung terbilang komplet. Mulai versi restoran mentereng, kafe trendi, sampai kuliner jalanan alias kaki lima tersedia semua. Agar hemat kantong, kuliner kaki lima bisa jadi pilihan. Dari masa ke masa, jumlah warung kaki lima di Bandung yang menjual makanan dengan kualitas bintang lima semakin banyak saja. Semuanya menawarkan makanan lezat dengan ciri khas masing-masing.

Salah satu jajanan kaki lima populer adalah bandros (foto kanan atas). Kue tradisional ini terbuat dari campuran tepung beras, kelapa parut, dan santan. Kue ini biasanya dihidangkan dengan taburan gula pasir. Bentuk kue ini mirip dengan kue pukis karena memang dicetak pada cetakan yang serupa. Ada dua jenis bandros yang dikenal, yaitu bandros asin dan bandros manis.

Salah satu penjual kue bandros yang sedang populer adalah Bandros Hebab. Tempat ini menyediakan menu kue

bandros dengan rasa kekinian. Untuk menu bandros asin, terdiri dari bandros kornet, bandros keju asin, bandros telur asin, bandros oncom, bandros sosis, bandros ayam, dan lainnya.

Sedangkan yang manis, terdiri dari bandros cokelat, bandros pisang, bandros keju susu, bandros kacang, bandros oreo, dan bandros rasa green tea sebagai menu terbarunya. Bandros Hebab berlokasi di Jalan Japati No 1, Sadang Serang, Coblong, Kota Bandung.

Pilihan lain penjual bandros kekinian adalah Bandros 88 yang lokasinya berada di Jalan Jupiter Barat No.65, Sekejati, Kota Bandung. Di sini 36 varian *topping* manis dan asin dengan cita rasa kekinian.

Jajanan khas Bandung lainnya adalah surabi. Jajanan ini terbuat dari adonan tepung beras serta santan kelapa. Jika dulu Surabi hanya dinikmati dengan kinca atau gula merah, sekarang, surabi dihadirkan dengan berbagai macam rasa

dan *topping*. Salah satu penjual surabi Bandung yang populer adalah Surabi Imut.

Pilihan surabi di sini terasa lezat karena limpahan *topping*-nya. Ada pilihan rasa coklat keju susu, Oreo keju susu, saus durian hingga telur oncom dan kinca. Surabi Imut ini ada di Jalan Dr. Setiabudi No.189, Gegerkalong. Selain Surabi Imut, kita bisa berkunjung juga ke Surabi Enhaii di Jalan Setiabudi, Surabi Sukur di Citarum, dan Surabi Cihapit di Jalan Cihapit.



Shutterstock/Sony Herdiana

PISANG BOLEN

Jika berlibur ke Bandung, rasanya kurang pas kalau tidak membeli oleh-oleh satu ini. Ya, pisang bolen yang melegenda ini punya rasa yang nikmat dan punya tempat tersendiri di hati penggemar kuliner khas Bandung. Perpaduan tekstur yang lembut dengan isian pisang yang manis melebur dengan nikmatnya coklat maupun keju, mampu membuat hati bahagia saat memakan camilan satu ini.



Shutterstock/Harismoyo

Kartika Sari adalah salah satu nama toko kue terlaris di Bandung, yang namanya telah dikenal masyarakat luas. Pisang bolen ini pun melejit berkat sang pemilik toko kue tersebut, Ratnawati Purnomo, yang mulai diperkenalkan di tahun 1984. Mulanya Ratnawati hanya menjual kue lapis dan bolu kukus, tapi kegemarannya pada dunia kue membuatnya berinovasi dan membuat pisang bolen dengan adonan kulit *pastry* yang nikmat. Nama bolen sendiri diambil dari bentuk kue ini yang hampir menyerupai truk pengaduk semen, yaitu truk molen.

JAJANAN KHAS KOTA KEMBANG

Meskipun sekarang banyak kuliner kekinian yang mengadopsi hidangan internasional, jajanan khas Jawa Barat tetap menjadi primadona di Bandung. Sebut saja mulai dari cireng, batagor, seblak, mie kocok, combro, misro, bangros, dan masih banyak lagi. Semua jajanan tersebut layak diburu saat berwisata ke Kota Kembang.

Nah, buat Sobat yang mengaku suka banget jajan, berikut adalah jajanan khas Kota Bandung yang paling enak dan paling banyak dicari untuk dinikmati.

MI KOCOK



Bisa dibilang makanan berkuah ini cuma bisa kamu temukan di Bandung. Perpaduan mie pipih, tauge, dan kulit sapi dengan kuahnya sangat menggoda ini paling enak dinikmati saat masih panas dengan tambahan sambal pedas dan juga kerupuk aci. Penjual mie kocok yang terkenal di Bandung dan bisa kamu kunjungi contohnya seperti Mie Kocok Mang Dadeng yang ada di Jalan Banteng dan Mie Kocok Pak Ade yang ada di Jalan Kebon Kawung.

SEBLAK



Shutterstock/Ricca Nevio

Seblak merupakan makanan yang dibuat dari kerupuk basah dan dilengkapi kuah yang identik dengan rasa pedas dengan tambahan *topping* lainnya. Bahkan kini, seblak sudah divariasikan dengan berbagai *topping* dan juga pasta. Pilihan warung penjual seblak antara lain Seblak Jebred di Jalan Buah Batu, Seblak Oces dan Seblak Basah Deu' Tjenghar di Jalan Purnawarman.

SIOMAY & BATAGOR



Shutterstock/Megharini Atifah

Orang Bandung sendiri menyebut siomay dengan baso tahu padahal isinya selain siomay, ada tahu, pare, kol gulung, tahu goreng, kentang, dan juga telur. Sedangkan batagor sendiri merupakan varian dari baso tahu yang digoreng (disingkat batagor). Keduanya sama-sama diberi bumbu kacang. Saat ini, siomay atau batagor yang terkenal yaitu Batagor Kingsley di Jalan Veteran dan Batagor Riri di Jalan Burangrang.



Untuk menikmati film *Joker*, Sobat harus melupakan ekspektasi melihat kehebatan *superhero* dengan segala kecanggihan CGI (*Computer-Generated Imagery*). Tanggalkan pula pemikiran memperoleh hiburan sederhana, alih-alih Sobat disuguhi drama mengenai tokoh baik yang teraniaya versus si jahat yang kejam dan licik. *Joker* merupakan sosok kompleks yang akan membuat penonton bingung, harus berempati atau malah ngeri dengan sisi kelam yang ditampilkan.

Sutradara sekaligus penulis skenario Todd Phillips (dalam menulis dibantu Scott Silver) menghadirkan *Joker* sebagai seorang pelawak gagal yang dipecondangi hidup. Mengambil sari pati kisah “*Batman: The Killing Joke*” (1988), keduanya berhasil mendaur ulang tokoh

musuh *Batman* di jagat DC menjadi sosok penjahat yang menuai banyak simpati.

Joker berkisah mengenai Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), seorang fakir yang sedari kecil bercita-cita menjadi komedian. Tujuannya sungguh mulia, membuat orang lain merasa bahagia. Rasa yang sesungguhnya belum pernah ia rasakan, meski hanya semenit dalam hidupnya.

Arthur orang baik, jalan hidupnya yang mengubahnya. Ia anak yang berbakti pada sang ibu. Dengan telaten ia menyiapkan makanan dan memandikan perempuan yang memanggilnya dengan nama “Happy”. Arthur tak pernah mendebat ketika sang ibu mendongeng tentang kebaikan Thomas Wayne, kandidat Wali Kota Gotham yang kaya raya. Hingga

kenyataan memukul telak, ia hanya anak adopsi perempuan penderita sakit jiwa. Ia pekerja yang berdedikasi meski semua orang memandang sebelah mata kepadanya. Hampir semua orang termasuk ibunya sendiri tertawa mendengar cita-citanya menjadi komedian. Namun mereka semua diam kala Arthur mengeluarkan leluconnya.

Di mata banyak orang, Arthur hanya orang aneh penderita gangguan jiwa yang berobat dengan BPJS. Manusia kesepian yang tak pernah dianggap penting, bahkan terapisnya yang dibayar murah oleh negara tak pernah benar-benar mendengarkan keluhannya.

Arthur adalah orang yang termarjinalkan, kehadirannya kerap terlupa dan sering kali tak “kasat mata”. Ia berusaha keras menyembunyikan luka menganga, di balik tawa yang tidak bisa ia kontrol. Dunia baru melihat eksistensinya ketika ia bersuluh menjadi Joker yang kejam.

Totalitas akting Phoenix, yang menurunkan bobot tubuhnya sampai 24 kg, membuat kita sulit untuk tidak

berempati pada Joker. Apresiasi juga diberikan karena ia berhasil menghapus jejak para pendahulunya, Jack Nicholson atau Heath Ledger dan mendaur ulang Joker hingga menjadi sosok yang luar biasa kompleks. Akting Phoenix yang memukau juga membuat kita sulit memutuskan, apakah Joker adalah penjahat atau bagian gelap dari diri kita.

Kompleksitas yang sama sebenarnya juga bisa terjadi dalam kegiatan penukaran valuta asing (*money changer*). Jika tidak jeli dalam memilih, maka bisa saja *money changer* tempat kita menukarkan uang merupakan salah satu *money changer* tidak berizin yang berpotensi sebagai tempat untuk melakukan tindakan kriminal pencucian uang dan terorisme. Alih-alih ingin untung mendapatkan *rate* yang ‘bagus’, malah buntung karena adanya risiko-risiko tersebut.

Maka sebagai pengguna sebaiknya kita perlu tahu mana *money changer* yang memiliki izin, dan mana yang tidak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya stiker resmi KUPVA Berizin dari Bank Indonesia yang kini telah dilengkapi dengan QR.



dccomic.com

BEGINI SYARAT PERUSAHAAN RINTISAN AGAR DAPAT PEMODAL

S iapa tak kenal Gojek? Perusahaan rintian yang dibidani Nadiem Makarim (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), Kevin Aluwi, dan Michaelangelo Moran itu, berdasarkan data Bloomberg Media hanya dalam waktu 10 tahun valuasinya sudah mencapai 10 juta dolar AS. Perusahaan yang minim aset fisik ini melesat cepat, apa rahasianya?

Selain model bisnis yang bagus, ada satu hal lain yang cukup krusial; secara legal, mereka mematuhi aturan-aturan yang berlaku. “Setiap perusahaan rintisan sebaiknya memiliki *founders agreement*. Ini untuk mengatur hak dan kewajiban para pendiri perusahaan,” sebut Muhamad Filosopi, *Co Founder* sekaligus *Chief Executive Officer* Legalku, lembaga konsultan hukum yang bekerja sama dengan lebih dari 200 UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Indonesia dalam aspek hukum.

Untuk mengetahui lebih jauh, apa saja yang harus disiapkan sebuah usaha rintisan dari aspek hukum dalam membangun bisnisnya, berikut petikan wawancara BICARA dengan lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung yang lama berkiprah di firma hukum dan perusahaan ini.



Muhamad Filosopi,
Chief Executive Officer dan
Co Founder Legalku Digital



Sebagai perusahaan rintisan, dari aspek hukum apa saja yang harus disiapkan?

Dalam memulai usaha rintisan, hal utama yang perlu diperhatikan adalah perjanjian antara pendiri atau *Founders Agreement* atas sebuah perusahaan/*start up*. Tujuannya untuk mengatur hak dan kewajiban dari para pendiri perusahaan. Setelah segala hak dan kewajiban dirasa telah cukup terlindungi dan terakomodir dalam perjanjian, maka dapat dilanjutkan dengan mendirikan Badan Hukum yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau *Commanditaire Venootschap* (CV), serta pendaftaran atas Hak Kekayaan Intelektual seperti merek dagang atas produk yang akan dihasilkan dari usaha.

Bagaimana caranya?

Membuat *Founders Agreement* sebenarnya mudah, hanya dengan menuangkan seluruh hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban secara rinci atas masing-masing pendiri. Akan tetapi, pemilihan kata-kata yang tepat, mitigasi atas risiko yang akan muncul dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia

merupakan kendala yang biasanya ditemui.

Sebagian besar perusahaan rintisan menyebutkan, sebenarnya pembentukan badan usaha itu dilakukan setelah bisnis berjalan, bagaimana Anda melihat hal ini?

Secara umum, keuntungan memiliki badan usaha adalah kesempatan untuk mengembangkan usaha secara profesional dengan memiliki identitas usaha, dan kepemilikan saham yang akan naik seiring dengan perkembangan usaha. Keuntungan secara khusus memiliki badan usaha antara lain pengakuan di mata hukum sehingga bila ada sengketa hukum dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Badan usaha itu juga sebagai entitas yang terpisah dari individu, sehingga lebih profesional. Yang lebih penting lagi ketika perusahaan memiliki prospek yang bagus, banyak investor-investor yang mulai melirik. Nah, biasanya investor besar semacam itu, perlu kepastian secara hukum bila terjadi *dispute*.

Banyak juga dari para pengusaha rintisan yang bingung memilih badan

usaha, bisa jelaskan, apa beda mendasar dari Perusahaan Terbatas, CV, dan Usaha Dagang?

Status hukum bagi PT adalah badan hukum, sedangkan untuk CV dan UD adalah badan usaha. Artinya, pengesahan yang dilakukan jika berbadan hukum didapatkan dari Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan CV dan UD hanya dari pengadilan setempat sehingga secara eksklusivitas juga berbeda. Jika pada nama PT berlaku hanya satu untuk seluruh Indonesia, sedangkan pada CV dan UD hanya berlaku di lokasi pengesahan badan usaha tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan ada nama yang sama di luar wilayah badan usaha tersebut.

Hal lain, pada PT terdapat pemisahan harta bagi pemegang saham: harta pribadi terpisah dari aset atau modal perusahaan sehingga tercatat di Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan untuk badan usaha seperti CV atau UD melekat ke pribadi pemilik badan usaha tersebut sehingga tanggungan keuangan akan di pertanggungjawabkan baik secara badan usaha maupun personal pemilik.

Berikutnya, modal usaha untuk badan hukum PT berupa lembar saham yang tercatat dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan CV dan UD tidak ada lembar saham serta tidak tercatat.

Setelah memiliki badan hukum, apa saja yang harus dilakukan?

Para pengusaha yang sudah berbadan hukum PT memiliki konsekuensi

keajiban pelaporan kepada otoritas usaha, mulai perizinan hingga perpajakan. Pengusaha yang memiliki mimpi untuk besar, pasti memprioritaskan perizinan usaha dan perpajakan, karena secara tidak langsung hal tersebut juga membantu pengusaha untuk ekspansi usahanya, atau pun akhirnya memilih untuk *Joint Operation* dengan pengusaha lain yang telah besar. Hal tersebut hanya dimungkinkan jika perusahaannya telah taat hukum perizinan dan perpajakan.

Saat ini, banyak para pengusaha rintisan yang mengincar pembiayaan dari luar atau venture capital, apa yang harus dipersiapkan?

Seperti yang sudah kami sebutkan, tentunya aspek legalitas usaha merupakan hal terpenting pertama, karena investasi yang akan masuk haruslah berbentuk saham, dan saham hanya ada di PT.

Kedua, tentunya aspek dari merek dagang usaha tersebut. Hal ini terkait reputasi dan *brand* pembeda atas usaha termasuk di dalamnya adalah nama produk atau nama perusahaan. Ketiga, adalah *internal compliance* seperti kontrak kerja karyawan, kontrak sewa kantor, perjanjian jual beli dengan klien, dan lain sebagainya.

Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan investor untuk menilai apakah manajemen perusahaan yang akan disuntikkan dana investasi, telah memikirkan risiko hukum yang dapat mempengaruhi usahanya di masa mendatang.



MENUJU INDONESIA MAJU

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan pandangan terkait ekonomi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019. Kegiatan tersebut dihadiri para pimpinan lembaga keuangan, kepala daerah, jajaran menteri, anggota dewan, pelaku industri keuangan, serta pengamat ekonomi.

PTBI 2019 dihelat di hotel Raffles, Jakarta (28/11) dengan membawa tema “Sinergi, Transformasi, Inovasi: Menuju Indonesia Maju”. Tema ini menjadi penting dalam memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menghadapi memburuknya ekonomi global.





Salah satu bentuk perlindungan dari kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, dalam skala Internasional, BI secara aktif menjalin kerja sama dengan bank sentral beberapa negara yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Di antaranya Bank Negara Malaysia pada 27 September 2019, Banko Sentral ng Pilipinas 4 Agustus 2018, dan Bank of Thailand 4 April 2019



ISI ANGKETNYA

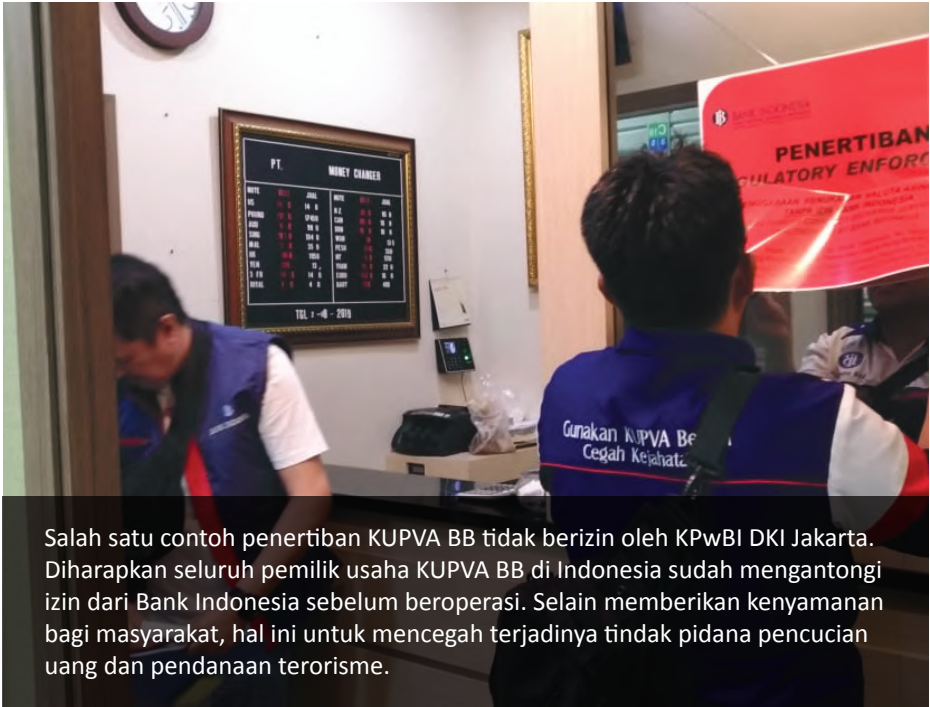
DAPATKAN HADIAHNYA!



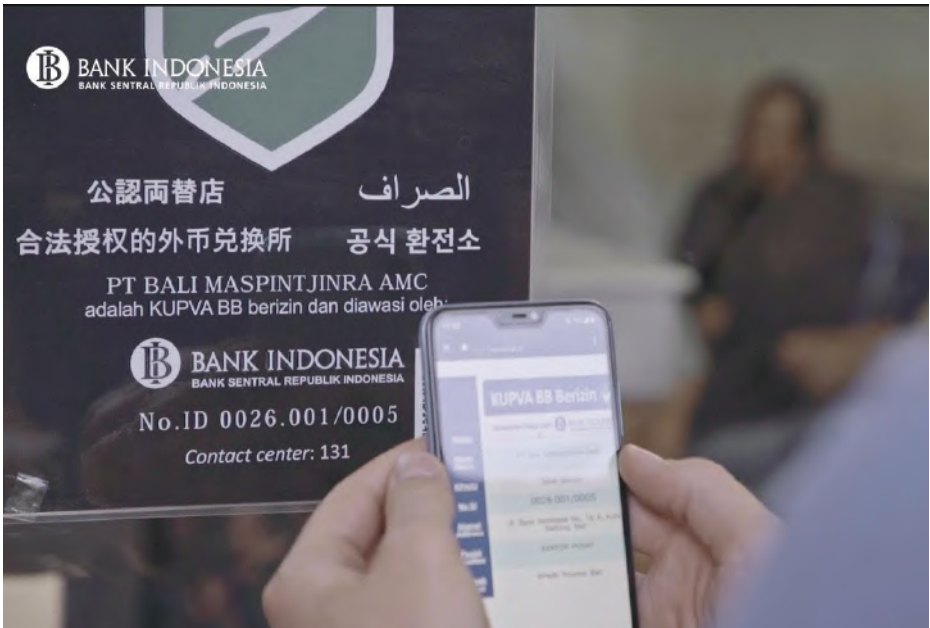
Berikan kami masukan untuk majalah BICARA edisi ini dan dapatkan suvenir spesial bagi 8 orang pemenang.

Silakan klik di <http://bit.ly/RisetBicara> atau scan barcode berikut ini.

Sampai Tanggal : 30 Desember 2019



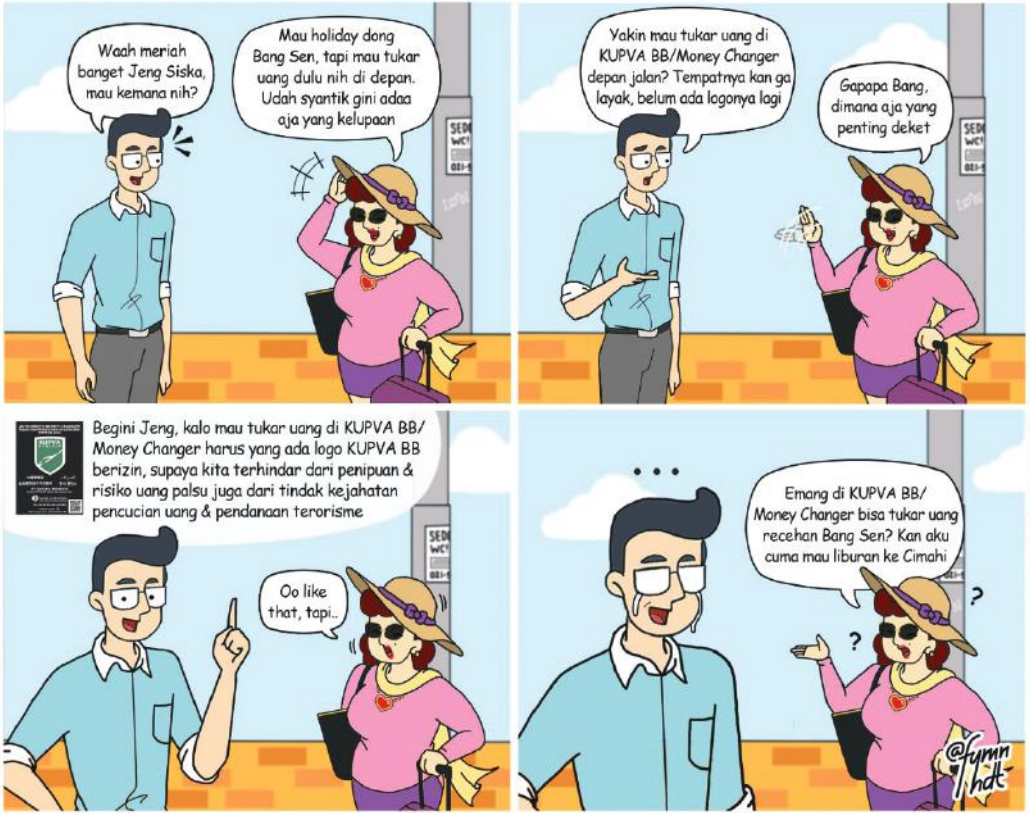
Salah satu contoh penertiban KUPVA BB tidak berizin oleh KPwBI DKI Jakarta. Diharapkan seluruh pemilik usaha KUPVA BB di Indonesia sudah mengantongi izin dari Bank Indonesia sebelum beroperasi. Selain memberikan kenyamanan bagi masyarakat, hal ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.



Bang Sen



Money Changer/KUPVA BB Berizin



BI mengimbau konsumen sebaiknya jeli dalam memilih *money changer* yang berizin agar lebih terjamin. Pasalnya *money changer* ilegal biasanya menawarkan rate yang sangat murah yang akan membuat harga pasaran uang asing menjadi rusak.



Kalo kata Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo, Indonesia punya potensi untuk mengembangkan wisata halal sekaligus menjadi pendorong ekonomi nasional. Meski belum jadi tujuan utama bagi wisatawan muslim, Global Muslim Travel Index (GMTI) menetapkan Indonesia dan Malaysia sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia di tahun 2019. Wow, keren kan?! Nah, buat mengasah insting traveler kita, coba deh #SobatRupiah kenalin negara wisata halal terbaik dengan ciri khasnya ;) kira2 bisa gak?

INI LOH JAWABANNYA



FOLLOW US



www.bi.go.id



BankIndonesiaOfficial



@bank_indonesia



bank_indonesia



Bank Indonesia Channel

TAHUKAH ANDA?

*Money Changer (KUPVA BB) tidak berizin dapat digunakan sebagai sarana *extra ordinary crime**



KUPVA BB TIDAK BERIZIN ADALAH MUSUH BANGSA

Selebrasi Tahun Baru Taktis, Hanya Dengan QRIS!

QRIS* Menuju Indonesia Maju



UNGGUL

UNIVERSAL • GAMPANG • UNTUNG • LANGSUNG

*Quick Response Code Indonesia Standard